

# Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap *Fiscal Stress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Rahma Nurhaliza <sup>1\*</sup>, Rosy Armaini <sup>2</sup>, Edy Firza <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia.

Email: [rahmanurhaliza09@gmail.com](mailto:rahmanurhaliza09@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [rosyarmaini@polsri.ac.id](mailto:rosyarmaini@polsri.ac.id) <sup>2</sup>, [edy.firza@polsri.ac.id](mailto:edy.firza@polsri.ac.id) <sup>3</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 8 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Nurhaliza, R., Armaini, R., & Firza, E. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap *Fiscal Stress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5198-5207. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4828>.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *Fiscal Stress* pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera antara tahun 2017 hingga 2023. Variabel independen terdiri dari desentralisasi fiskal, dana perimbangan, belanja modal dan belanja pegawai. Studi ini menggunakan data sekunder dari LRA melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Populasi penelitian ini ialah provinsi di pulau Sumatera. Sebanyak 56 sampel dipilih melalui penerapan metode purposive sampling. Penelitian kuantitatif ini dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan software Eviews 12. Hasil menjelaskan bahwasanya, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan, dana perimbangan serta belanja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal; Dana Perimbangan; Belanja Modal; Belanja Pegawai; *Fiscal Stress*.

## Abstract

This study is intended to analyze the factors that influence *Fiscal Stress* on provincial governments on the island of Sumatra between 2017 and 2023. The independent variables consist of fiscal decentralization, balancing funds, capital expenditure and personnel expenditure. This study utilizes secondary data from the LRA through the BPK RI Audit Report (LHP). The population of this study is the provinces on the island of Sumatra. A total of 56 samples were selected through the application of the purposive sampling method. This quantitative study was conducted using multiple linear regression analysis using Eviews 12 software. The results explain that fiscal decentralization has a significant negative impact, balancing funds and employee expenditures have a significant positive effect, and capital expenditures have no significant effect.

**Keyword:** Fiscal Decentralization; Balancing Fund; Capital Expenditure; Employee Expenditure; *Fiscal Stress*.

## 1. Pendahuluan

Pemberian wewenang terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat dalam otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah mengatur otonomi daerah di Indonesia, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengendalikan beberapa area kecuali yang berada di bawah lingkup pemerintah pusat, seperti militer, kebijakan luar negeri, dan urusan moneter. Pemerintah daerah dapat memikul lebih banyak tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk karena adanya otonomi daerah. Otonomi daerah dapat menjadi tantangan tersendiri karena adanya tuntutan untuk mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pengelolaan daerah secara efektif. Pemerintah daerah menghadapi *Fiscal Stress* yang lebih besar dibanding dengan masa sebelum otonomi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan fiskal mereka dan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. (Dwitayanti., dkk. 2019).

Pulau Sumatera, sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman budaya yang unik di setiap provinsinya. Dalam konteks otonomi daerah, provinsi di pulau Sumatera menyelenggarakan otonomi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Provinsi di pulau Sumatera memanfaatkan dan mengembangkan potensi unggulan masing-masing. Beberapa provinsi yang kaya sumber daya seperti Riau dan Sumatera Selatan mungkin lebih mampu mengatasi *Fiscal Stress* dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti Bengkulu atau Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus diimbangi dengan strategi peningkatan kapasitas fiskal agar *Fiscal Stress* dapat diminimalisir dan pembangunan daerah berjalan optimal. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah karena tidak tersedia sumber daya yang dapat diolah menjadi pendapatan asli daerah, maka kemampuan fiskal untuk menutup belanja menurun, sehingga kesenjangan pendapatan dan pengeluaran meningkat sehingga menimbulkan *Fiscal Stress*. (Citra, 2024). Defisit anggaran merupakan penyebab terjadinya *Fiscal Stress* dimana mencerminkan pengeluaran belanja lebih besar daripada pendapatan. Apabila belanja daerah melebihi dari pendapatan daerah, maka daerah tersebut harus mencari pendanaan tambahan, seperti utang daerah atau penggunaan dana cadangan, yang dapat meningkatkan beban fiskal di masa depan. Tersaji pada gambar 1 data surplus/defisit anggaran LRA pada tahun 2023.



Gambar 1. Surplus/Defisit Anggaran Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat pada tahun 2023 terdapat 9 dari 10 provinsi mengalami defisit anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih tinggi dari pada pendapatan daerah. Penerapan desentralisasi fiskal dapat menjadi pengukuran kemampuan pemerintah dalam mengurangi tingkat *Fiscal Stress* (Ridwan & Nawir, 2021). Desentralisasi fiskal yang mengalami kenaikan akan berdampak dalam mengurangi tingkat terjadinya *Fiscal Stress* (Azzahra, 2023). Salah satu bentuk usaha

## RESEARCH ARTICLE

yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pendapatan daerah dilakukan untuk menutupi belanja daerah yang menderung meningkat setiap tahunnya. Apabila pendapatan daerah tidak dapat memenuhi pembiayaan belanja daerah maka akan menimbulkan terjadinya *Fiscal Stress*. Apabila pemerintah daerah tidak berusaha mengoptimalkan PADnya dan memiliki tingkat ketergantungan pada dana perimbangan yang tinggi dapat menyebabkan *Fiscal Stress* pada daerah tersebut. Undang-Undang HKPD Nomor 1 tahun 2022 juga mengatur tentang belanja daerah yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Salah satunya belanja pegawai dan belanja modal. Jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk belanja modal adalah 40% dari APBD, sedangkan jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk belanja pegawai adalah 30%. Menurut hasil penelitian Cahyani (2024) jumlah yang dibelanjakan untuk pegawai oleh pemerintah provinsi selalu lebih besar daripada jumlah yang dibelanjakan untuk modal. Biaya pegawai yang tinggi dapat mengakibatkan defisit anggaran yang lebih tinggi atau lebih sedikit dana yang dialokasikan ke sektor lain jika tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan pemerintah. *Fiscal Stress* atau ketegangan anggaran akan meningkat sebagai akibatnya. Belanja modal yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur dan layanan publik, tetapi jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah, terutama dari PAD (PAD), maka dapat menyebabkan *Fiscal Stress*. Tekanan ini muncul ketika belanja modal meningkatkan beban operasional jangka panjang, seperti biaya pemeliharaan dan pengelolaan aset, sementara pendapatan daerah tidak cukup untuk menutup pengeluaran tersebut. Sebaliknya, jika belanja modal dikelola secara efisien dan diarahkan pada investasi produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan daerah di masa depan dan mengurangi *Fiscal Stress*. Rumusan masalah penelitian ini, yang didasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan, adalah apakah desentralisasi fiskal, dana perimbangan, belanja modal, serta belanja pegawai memiliki dampak dengan parsial terhadap *Fiscal Stress*. Tujuan dari studi ini yaitu guna melihat dampak independent variable serta dependent variable secara parsial.

## 2. Tinjauan Pustaka

Fiscal stress pada pemerintah daerah menjadi topik yang penting dalam kajian ekonomi publik, terutama terkait dengan kemampuan fiskal daerah untuk mengelola anggaran dengan baik. *Desentralisasi fiskal*, sebagai salah satu bentuk kebijakan yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, dapat mempengaruhi tingkat *stress fiskal* yang dihadapi oleh daerah. Menurut Dwitayanti *et al.* (2019), *desentralisasi fiskal* memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, namun juga membawa tantangan baru terkait dengan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih terbatas. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Azzahra (2023), yang menunjukkan bahwa *desentralisasi fiskal* yang baik dapat mengurangi tekanan *fiskal* di pemerintah daerah, karena dapat memperkuat basis pendapatan daerah. *Dana perimbangan*, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, juga berperan penting dalam mengurangi *fiscal stress*. Namun, Citra (2024) mengingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada *dana perimbangan* dapat memperburuk *stress fiskal*, karena daerah menjadi kurang mandiri dalam pembiayaan belanjanya. Selain itu, *belanja pegawai* dan *belanja modal* menjadi faktor krusial dalam analisis *fiscal stress*. Penelitian Cahyani *et al.* (2024) menemukan bahwa tingginya *belanja pegawai* dapat meningkatkan tekanan *fiskal* karena pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah. Di sisi lain, *belanja modal* yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan *pendapatan asli daerah* (PAD), maka akan menambah beban *fiskal* jangka panjang (Suryani & Windijarto, 2023). Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh pemerintah daerah, terutama di Pulau Sumatera yang memiliki keberagaman dalam kapasitas fiskalnya (Putri, 2023).

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data bersumber dari situs resmi E-PPID Pusat BPK RI, khususnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD provinsi di Pulau Sumatera yang mencakup periode 2017 hingga 2023, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Penelitian ini menguji variabel independen yaitu desentralisasi fiskal, belanja pegawai, belanja modal, serta dana perimbangan, sedangkan *Fiscal Stress* menjadi variabel dependen. Metode yang diterapkan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling, yang mencakup 8 provinsi, sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 56 untuk dianalisis. Kriteria pemilihan sampel yang dipergunakan adalah:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera	10
Jumlah Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera yang tidak memenuhi kriteria ( <i>Fiscal Stress</i> > Rp.5.000.000.000.000)	(2)
Jumlah Sampel	8
Jumlah Tahun Penelitian	7
Jumlah Unit Analisis	56

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis statistik yang dilakukan dengan software Econometric Views (Eviews) 12 untuk menguji data. Pengujian yang dilakukan ialah koefisien determinasi, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi, dan pengujian secara parsial, semuanya disertakan dalam analisis. Bentuk persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

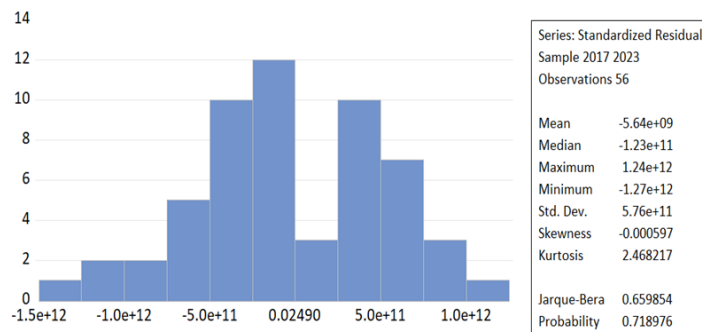
$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Desentralisasi Fiskal} + \beta_2 \text{Dana Perimbangan} + \beta_3 \text{Belanja Modal} + \beta_4 \text{Belanja Pegawai} + \varepsilon$$

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil

##### 4.1.1 Pemilihan Model Regresi

Model terbaik yang digunakan untuk menguji dampak desentralisasi fiskal, belanja pegawai, belanja modal, serta dana perimbangan kepada *Fiscal Stress* yang pemerintah alami daerah provinsi di Sumatera, setelah dilakukan ketiga uji, menyatakan bahwa model yang terbaik adalah CEM.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pada gambar 1, uji normality yang menggunakan uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitasnya melebihi 0,05 yaitu 0,718976 > 0,05. Maka, disimpulkan bahwa data yang diunakan berdistribusi normal

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.92E+23	27.74625	NA
X1	1.61E+20	38.25549	1.439158
X2	0.013382	22.52011	3.247848
X3	0.074275	10.82220	2.269897
X4	0.078997	30.79516	3.261291

Pada tabel tersebut bisa diketahuui nilai CenteredVIF dari Desentralisasi Fiskal (X1) sebesar 1.439158, variabel Dana Perimbangan (X2) sebesar 3.247848, variabel Belanja Modal (X3) sebesar 2.269897 dan variabel Belanja Pegawai (X4) sebesar 3.261291, semua variabel menunjukkan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil pengujian ini menyatakan diantara variabel bebas dalam regresi tidak ada multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	3.542059	Prob. F(1,53)	0.0653
Obs*R-squared	3.445458	Prob. Chi-Square(1)	0.0634

Pada tabel tersebut dapat dilihat hasil uji multikolinearitas pada data yang digunakan tidak ada terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi. Obs\*R-Squared menyatakan nilai probabilitas chi-square 0.0634 > 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	-3.50E-05
S.D. dependent var	5.99E+11
Akaike info criterion	57.21647
Schwarz criterion	57.47195
Hannan-Quinn criter.	57.31527
Durbin-Watson stat	2.012925

Pada tabel tersebut, hasil dari uji Durbin-Watson diperoleh DW sebesar 2,012925. Dilihat pada tabel DW, nilai DW ada diantara dU serta 4-dU yakni 1,77246 > 2,0129 < 2,275. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dalam regresi ini tidak ada a utokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.638733
Adjusted R-squared	0.610398
S.E. of regression	6.22E+11
Sum squared resid	1.97E+25
Log likelihood	-1597.572
F-statistic	22.54246
Prob(F-statistic)	0.000000

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan tabel 5, uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,638733 atau 63,8733%. Nilai koefisien determinasi ini menggambarkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Belanja Pegawai bisa menjelaskan variabel dependen yaitu *Fiscal Stress* Provinsi di Pulau Sumatera sebesar 63,8733%, sementara sisanya yaitu 36,1267% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 6. Hasil Regresi Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.30E+12	4.38E+11	2.975692	0.0045
X1	-2.80E+10	1.27E+10	-2.202529	0.0322
X2	0.297155	0.115680	2.568777	0.0132
X3	0.498648	0.272535	1.829668	0.0731
X4	0.638578	0.281065	2.271996	0.0273

Hasil dari pengujian menggunakan pendekatan regresi linier berganda dengan model CEM menghasilkan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,302428 - 2,795637 X1 + 0,297155 X2 + 0,498648 X3 + 0,638578 X4 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas bisa dilihat hubungan antar variabel melalui cara melihat bagaimana setiap variabel memengaruhi. Hasil dari pengujian ini bahwa regresi linear berganda menghasilkan nilai variabel X1 = -2,795, X2 = 0,297, X3 = 0,498, X4 = 0,638, dan nilai konsta sebesar 1,302.

Tabel 7. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.30E+12	4.38E+11	2.975692	0.0045
X1	-2.80E+10	1.27E+10	-2.202529	0.0322
X2	0.297155	0.115680	2.568777	0.0132
X3	0.498648	0.272535	1.829668	0.0731
X4	0.638578	0.281065	2.271996	0.0273

- 1) Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) mempunyai nilai thitung senilai -2,202529 dengan nilai probabilitas 0,0322 yang memiliki arti dengan parsial bahwasanya Desentralisasi fiskal beradmpak negatif dan signifikan kepada *Fiscal Stress*.
- 2) Variabel Dana Perimbangan (X2) mempunyai nilai thitung 2,568777 dengan nilai probabilitas 0,0132 yang memiliki arti dengan parsial bahwasanya Dana Perimbangan berdampak positif kepada *Fiscal Stress*.
- 3) Variabel Belanja Modal (X3) mempunyai nilai thitung 1,829668 dengan nilai probabilitas 0,0731 yang memiliki arti secara parsial bahwa Belanja Modal tidak berdampak kepada *Fiscal Stress*.
- 4) Variabel Belanja Pegawai (X4) mempunyai nilai thitung sebesar 2,271996 dengan nilai probabilitas 0,0273 yang memiliki arti dengan parsial bahwasanya Belanja Pegawai berdampak positif kepada *Fiscal Stress*.

Tabel 8. Hasil Uji F

Root MSE	5.93E+11	R-squared	0.638733
Mean dependent var	2.56E+12	Adjusted R-squared	0.610398
S.D. dependent var	9.96E+11	S.E. of regression	6.22E+11
Akaike info criterion	57.23472	Sum squared resid	1.97E+25
Schwarz criterion	57.41556	Log likelihood	-1597.572
Hannan-Quinn criter.	57.30483	F-statistic	22.54246
Durbin-Watson stat	0.886202	Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai F-tabel sebesar 2,553. Uji ini menghasilkan nilai F-statistic 22,54246 dengan nilai signifikan 0,000000 artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*, berdasarkan hasil ini maka model regresi pada penelitian ini dianggap layak.

#### 4.2 Pembahasan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas sebesar  $0.0322 < \alpha 0.05$  dan nilai thitung ( $2.202529 > 2.00758$ ). Hal ini menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Desentralisasi Fiskal (X1), yang mengindikasikan bahwasanya menerima H1. Hasil tersebut sejalan pada temuan Citra (2024) yang memasukkan tiga variabel yang sebanding dengan penelitian ini dan empat variabel independen. Menurut temuan studi tersebut, *Fiscal Stress* secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal. Selain itu, studi terkait lainnya oleh Putri (2023) menemukan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan dan negatif mempengaruhi *Fiscal Stress*. Menurut temuan studi ini, desentralisasi fiskal dapat membantu mengurangi *Fiscal Stress*, terutama jika daerah tersebut memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Menurut penelitian sebelumnya, pemerintah telah menggunakan dampak desentralisasi fiskal yang merugikan sebagai cara untuk mengurangi tingkat *Fiscal Stress*. Berdasarkan skala interval tingkat desentralisasi fiskal, hal ini diwakili oleh nilai rata-rata 39,7%, yang dapat diklasifikasikan sebagai “sedang”. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah telah menerapkan prinsip desentralisasi fiskal sesuai dengan tuntutan pemerintah untuk program otonomi daerah. Meskipun demikian, mereka telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan menerapkan prinsip desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri, pemerintah daerah harus terus mengembangkan kapasitas keuangannya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan fiskal yang dialami berkorelasi negatif dengan tingkat desentralisasi fiskal di pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Dengan kata lain, *Fiscal Stress* menurun seiring dengan meningkatnya desentralisasi fiskal. Temuan analisis menunjukkan bahwa tekanan fiskal di pemerintah provinsi di Sumatera dipengaruhi secara negatif oleh desentralisasi fiskal. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, peningkatan kuantitatif sebesar 1 unit dalam Desentralisasi Fiskal akan menyebabkan penurunan sebesar 2,795 poin pada *Fiscal Stress*. Temuan ini sama dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi pada kapasitas yang lebih besar untuk pendapatan daerah, yang menurunkan tingkat tekanan fiskal yang dihadapi Pemda.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas sebesar  $0.0132 < \alpha 0.05$  dan angka thitung yang lebih besar dari ttabel ( $2.568777 > 2.00758$ ). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya menerima H2 karena variabel Dana Perimbangan (X2), dengan signifikan mengurangi *Fiscal Stress* pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Temuan studi ini sejalan dengan sudi Putri (2024), yang mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan secara signifikan dan positif mempengaruhi *Fiscal Stress* di pemerintah provinsi di Indonesia Selain itu, Suryani & Windijarto (2023) memberikan bukti bahwa Dana Perimbangan secara signifikan dan positif mengurangi *Fiscal Stress* pemerintah daerah Jawa Timur. Namun, menurut analisis Citra (2024), Dana Perimbangan secara signifikan dan negatif mempengaruhi *Fiscal Stress* pemerintah daerah Sumatera Selatan. Sebagai dana transfer dari pemerintah pusat, Dana Perimbangan membantu Pemda guna membiayai pengeluaran mereka. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan secara signifikan dan positif mempengaruhi *Fiscal Stress* di pemerintah provinsi di Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan dari pemerintah

## RESEARCH ARTICLE

pusat telah dimaafkan secara optimal. Namun, kemungkinan untuk menjadi tergantung pada pemerintah pusat meningkat seiring dengan jumlah uang yang diterima dari Dana Perimbangan. Diharapkan pemerintah daerah tidak menggunakan Dana Perimbangan sebagai sumber pendanaan utama karena hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan menghalangi mereka untuk merealisasikan potensi mereka secara maksimal. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa tingkat *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera akan meningkat seiring dengan besarnya dana perimbangan pemerintah provinsi. Diasumsikan seluruh variabel yang lain tetap konstan, sehingga *Fiscal Stress* bisa mengalami kenaikan mencapai 0.297 untuk setiap penambahan 1.00 Dana Perimbangan. Berdasarkan perbandingan pada penelitian sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan membuat pemerintah daerah lebih bergantung pada pemerintah pusat, mengurangi kemandirian mereka dan mungkin meningkatkan tingkat tekanan fiskal. Tabel diatas memperlihatkan hasil probabilitas sebesar  $0,0731 > \alpha 0,05$  dan nilai thitung ( $1,829668 < 2,00758$ ). Oleh karena itu, H3 ditolak sehingga variabel Belanja Modal (X3) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Temuan studi ini sejalan dengan temuan Yurnal & Handayani (2024) yang menemukan tidak adanya hubungan antara belanja modal dengan tekanan keuangan yang dialami oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat. Penelitian Dwitayanti dkk. (2019) lebih lanjut mendukung temuan ini, dengan memperlihatkan bahwasanya belanja modal tidak berdampak kepada *Fiscal Stress* di pemerintah daerah. Namun, penelitian Icih (2021) juga menunjukkan bahwa belanja modal di pemerintah provinsi di Indonesia memiliki dampak positif terhadap tekanan fiskal.

Temuan studi ini mengindikasikan bahwa tingkat *Fiscal Stress* yang dialami oleh pemerintah daerah tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan tingkat belanja modal. Terdapat variasi dalam realisasi belanja modal dari tahun 2017 hingga 2023. Belanja modal meningkat antara tahun 2017 dan 2019 seiring dengan inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur publik. Namun, dampak COVID-19 menyebabkan penurunan besar pada tahun 2020-2021, ketika dana untuk belanja modal dialihkan untuk mendukung sektor kesehatan dan memberikan bantuan sosial serta inisiatif pemulihan ekonomi. Selain itu, belanja modal sedikit meningkat pada tahun 2022-2023, tetapi belum sepenuhnya stabil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal belum optimal, sehingga tidak dapat mempengaruhi pengurangan atau peningkatan *Fiscal Stress*, terutama dalam waktu dekat. Faktor lainnya memperlihatkan Belanja Modal tidak berdampak kepada *Fiscal Stress* yaitu faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera seperti erupsi gunung merapi di Sumatera Barat yang menyebabkan pengurangan ruang fiskal untuk Belanja Modal. Selanjutnya juga terdapat kendala dalam implementasi proyek yang dimana sebagian proyek Belanja Modal tidak berjalan efektif atau mengalami keterlambatan penyerapan anggaran seperti pembangunan fasilitas publik yang tidak sesuai volume yang ditemukan dalam hasil audit BPK pada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Hal ini menyebabkan fluktuasi yang tidak menentu dalam realisasi Belanja Modal sehingga Belanja Modal tidak dapat memengaruhi terjadinya *Fiscal Stress*. Tabel diatas memperlihatkan hasil nilai thitung ( $2,271996 > 2,00758$ ) dan nilai probabilitas  $0,0273 < \alpha 0,05$ . Artinya dengan parsial variabel Belanja Pegawai (X4) memiliki pengaruh signifikan kepada *Fiscal Stress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera sehingga H4 diterima. Temuan ini selaras pada studi dari Suryani & Windijarto (2023) yang menunjukkan bahwasanya Belanja Pegawai berdampak positif signifikan kepada *Fiscal Stress* di Pemda Jawa Timur. Hasil tersebut didukung dari temuan Cahyani (2024) yang menjelaskan bahwasanya Belanja Pegawai berdampak positif serta signifikan kepada tekanan fiskal di Pemerintah Sumatera Selatan. Menurut PMK RI No.102/PMK.02/2018, "Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pemerintah". *Fiscal Stress* dapat meningkat karena ada tuntutan peningkatan kemandirian yang mengharuskan melakukan peningkatan penerimaan sendiri dalam pengeluaran yang ada (Rianti, 2020). Begitu juga dengan tingginya biaya gaji, tunjangan dan fasilitas untuk pegawai menyebabkan pengalokasian Belanja Pegawai dalam belanja daerah cukup tinggi artinya belanja pegawai memiliki kontribusi cukup besar dalam pengeluaran belanja daerah.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *desentralisasi fiskal* secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress* pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *desentralisasi fiskal*, semakin rendah tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, *dana perimbangan* secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* di pemerintah provinsi Pulau Sumatera, yang berarti semakin tinggi tingkat *dana perimbangan*, maka tingkat *fiscal stress* yang dihadapi pemerintah daerah diprediksi akan meningkat. Di sisi lain, *belanja modal* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera, karena perubahan dalam *belanja modal* terbukti tidak mempengaruhi tingkat *fiscal stress*. Namun, *belanja pegawai* secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *fiscal stress*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *belanja pegawai*, maka semakin tinggi pula tingkat *fiscal stress* yang dialami pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai yang tidak efisien dapat menambah tekanan fiskal pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera.

## 6. Referensi

- Azzahra, M., Arifin, K. Z., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh PAD, belanja modal, dan desentralisasi fiskal terhadap *fiscal stress* pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(5), 2243-2254.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*. Indonesia.
- Cahyani, A. D., Sandrayati, & Choiruddin. (2024). Determinan (tekanan *fiscal stress* anggaran) pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(5).
- Citra, A. J., Masnila, N., & Mubarak, H. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 132-142.
- Dwiyanti, Y., Nurhasanah, & Armaini, R. (2019). Determinan *fiscal stress* pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, 3(1), 68-78.
- Hoesada, J. (2020). *Bunga rampai: Akuntansi pemerintahan* (Buku ke-2). Selemba Empat.
- Icih, A. K., & Fadillah, R. (2021). The influence of local revenue, capital expenditure, economic growth of GDP, general allocation funds, fiscal decentralization and diversification of regional income on *fiscal stress*. *Journal of Accounting for Sustainable Society*, 3(2), 34-35.
- Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Puspitorini, D., & Lenggogeni. (2022). Variables affecting *fiscal stress* in regency/city of Aceh Province 2016-2019 period. *Budapest International Research and Critics Institute – Journal*, 5(2).

## RESEARCH ARTICLE

- Putri, H. A., Hartati, S., & Aryani, Y. (2023). Determinan fiscal stress pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2).
- Putri, M., Dewata, E., & Aryani, Y. (2024). Pengaruh diversifikasi pendapatan daerah dan dana perimbangan terhadap fiscal stress pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2).
- Ridwan, N. I. S. (2021). *Buku ekonomi publik* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, I., Martini, R., & Ahnaf, M. F. (2021). Fiscal stress: Growth aspects of PAD, growth of capital expenditure, and economic growth. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi*, 10(1), 177-183.
- Suryani, S. S., & Windijarto. (2023). Determinan of fiscal stress on local government finances in East Java. *Journal of Social Research*, 2(4).
- Yurnal, R. G., & Handayani, D. F. (2024). Pengaruh DAU, DAK, dan belanja modal terhadap fiscal stress pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 1737–1750.